INDONESIAN TREASURY REVIEW
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

DETERMINAN PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH: STUDI PADA 10 PROVINSI DI INDONESIA

Eliza Noviriani
Politeknik Negeri Pontianak

Anniza Dwi Febrianty

Alamat Korespondensi: eliza.sabarani@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
30 November 2016

Dinyatakan Diterima
16 Maret 2017

KATA KUNCI:
Macroeconomics, Fiscal Policy.

KLASIFIKASI JEL:
C23, E10, E62.

ABSTRAK

The aim of this study is to determine local government revenue and expenditure determinants from 10 provinces in Indonesia. The factors which affect local government revenue are Gross Regional Domestic Product (GDPR), inflation, and exchange rate. The local government revenue will affect local government expenditure. By using panel data, the research showed that variable of GDPR did not have influence on local government revenue. In addition, variable of inflation had a negative and significant influence on the local government revenue. Exchange rate had a positive and significant effect on local government revenue. Finally, local government revenue had a positive and significant impact on local government expenditure.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan penerimaan dan belanja daerah di 10 Provinsi di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi serta kurs. Penerimaan daerah akan berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan menggunakan data panel memperoleh hasil bahwa variabel PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan daerah. Selain itu, variabel inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan daerah. Variabel kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah. Akhirnya, variabel penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah daerah.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pola hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengalami perubahan, dari sentralistik ke arah desentralisasi (Husna, 2015).[1] Pelaksanaan otonomi daerah merupakan perwujudan dari kebijakan desentralisasi tersebut. Kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi, pelayanan publik, serta pembangunan. Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan penerimaan daerah guna memenuhi kebutuhan keuangan dalam kerangka otonomi daerah.

Penerimaan Daerah merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika Penerimaan Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Penerimaan Daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Pratiwi, 2007).[2]

Untuk meningkatkan penerimaan daerah terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah PDRB, Inflasi dan nilai tukar (kurs). Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah menandakan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, terutama penerimaan dari PAD karena kemampuan masyarakat membayar pajak juga meningkat.

Sementara itu, semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah penerimaan suatu daerah. Hal ini dapat terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang maupun jasa, walaupun pada kondisi riil, kenaikan inflasi tersebut biasanya diiringi dengan kenaikan upah atau gaji pekerja. Sebagaimana pernyataan Husna (2015) yang menyatakan bahwa penerimaan daerah yang terpengaruh oleh inflasi terletak pada aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana inflasi mempengaruhi PAD yang penetapannya didasarkan pada omset penjualan (perdagangan), misalnya pajak hotel dan pajak restoran.

Pada sisi lain, keterkaitan kurs dengan penerimaan daerah terjadi pada aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari industri pariwisata. Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata akan meningkatkan peran sektor tersebut dalam penerimaan daerah. Untuk menunjang pengembangan pariwisata, beberpa komponen harus diperhatikan, misalnya jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita, faktor keamanan, nilai kurs, serta investasi di industri pariwisata (Arlina dan Purwanti, 2013).[3] Oleh karena itu, nilai tukar rupiah memiliki berdampak pada penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

Penelitian yang menguji pengaruh PDRB serta Inflasi terhadap Penerimaan Daerah memang telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Gitaningtyas, *et al.* (2014)[4], Aryanti dan Indarti (2010)[5] dan Muchtholifah (2010)[6]. Akan tetapi, mayoritas

---

[1] Umdatul Husna, Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota Se Jawa Tengah. *Skripsi*, tidak dipublikasikan. (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2015).

[2] Novi Pratiwi, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. *Tesis*, tidak dipublikasikan. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2007).

[3] Riska Arlina dan Evi Yulia Purwanti. Analisis Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Diponegoro Journal of Economics, 2 (3),* 2013, hlm. 1-15.

[4] Gitaningtyas *et al.*, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. *Artikel Ilmiah Mahasiswa,* 2014, hlm. 1-7.

[5] Eni Aryanti dan Iin Indarti. *Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang*, (2010).

[6] Muchtholifah. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industry dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota

penelitian tersebut menganalisis variabel PDRB serta inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan penerimaan daerah secara keseluruhan. Selain itu, pengujian variabel inflasi pada penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya melakukan analisis dalam lingkup satu wilayah utama yaitu satu Provinsi atau Kota/ Kabupaten. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang membahas pengaruh inflasi terhadap penerimaan daerah dalam lingkup yang lebih luas. Berkaitan dengan kurs, variable ini cukup berpengaruh terhadap penerimaan daerah terutama pada daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber penerimaan utama seperti Bali.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sumber-sumber Penerimaan yang diperoleh oleh daerah selanjutnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaran urusan kepemerintahan. Artinya, semakin tinggi penerimaan daerah maka semakin besar alokasi belanja daerah. Warsito *et al.* (2008)[7] mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu, dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan daerah yang semakin tinggi memiliki kecenderungan untuk meningkatakan alokasi belanja daerah. Namun, data menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi antara tingkat penerimaan daerah terhadap belanja daerah, dimana pada saat penerimaan mengalami kenaikan, belanja daerah justru mengalami penurunan seperti terlihat pada Gambar 1. Untuk memberikan gambaran hal tersebut, Gambar 3 menunjukkan perbandingan penerimaan dan belanja daerah di Sumatera Utara.

Berdasarkan Gambar 3, pada tahun 2013, penerimaan daerah mengalami kenaikan kurang lebih 200 ribu triliun rupiah dari kisaran 7,2 juta triliun rupiah menjadi 7,4 juta triliun rupiah. Pada saat yang sama, belanja daerah justru mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 7,6 juta triliun rupiah menjadi 7,3 triliun rupiah. Fakta ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013, kenaikan penerimaan daerah tidak diiringi dengan kenaikan belanja di Sumatera Utara. Hal ini mendorong peneliti untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara tingkat penerimaan dengan belanja daerah.

Secara teoritis, besarnya penerimaan daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk (populasi) (Ariasih *et al.* tanpa tahun). Jika penduduk suatu daerah tergolong banyak, maka tingkat konsumsi masyarakat tinggi sehingga pemasukkan daerah juga mengalami kenaikan. Hal ini senada dengan pernyataan Halim (2001)[8] dan Nurcholis (2005)[9] yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuannya untuk membayar *(ability to pay)* berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih 10 provinsi dengan penduduk terbanyak untuk dianalisis. Karena provinsi-provinsi tersebut tergolong provinsi besar di Indonesia, maka fasilitas untuk mendukung aktivitas kehidupan masyarakat seperti pusat produksi, perdagangan, pemerintahan, pariwisata hingga sosial budaya juga banyak tersedia. Hal ini mengakibatkan penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari berbagai pungutan pajak akan berjumlah lebih besar. Oleh sebab itu, kondisi riil provinsi-provinsi tersebut dapat merepresentasikan atau setidaknya mewakili provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti bermaksud melakukan riset penerimaan dan belanja daerah dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini ingin mendalami pengujian penerimaan dan belanja daerah pada 10 provinsi di Indonesia karena beberapa alasan, yaitu: *Pertama,* penelitian yang mengangkat topik penerimaan dan belanja daerah hanya mengkaji satu lingkup wilayah tertentu, misalnya satu provinsi, kabupaten/ kota. Hal ini membuat peneliti tertantang untuk mengembangkan penelitian dengan memperluas lingkup penelitian. *Kedua,* penelitian yang mengeksplorasi mengenai variabel kurs terhadap penerimaan masih jarang dilakukan. *Ketiga,* analisis mengenai variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan dan belanja daerah dirasa sangat penting. Dengan mengetahui kondisi tersebut, pemerintah dapat menempuh kebijakan untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan dan selanjutnya

---

Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan, 1(1)*, 2010.

[7] Kawedar Warsito *et al., Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah, (*Semarang: Penerbit UNDIP, 2007).

[8] Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2001).

[9] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dalam Otonomi Daerah,* (Jakarta: Grasindo, 2005).

mengalokasikan penerimaan tersebut ke dalam pengeluaran-pengeluaran penting dengan efektif dan efisien.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan kurs berpengaruh terhadap penerimaan daerah?, serta Apakah variabel penerimaan Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah? Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan kurs berpengaruh terhadap penerimaan daerah serta untuk mengetahui apakah variabel penerimaan daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan sektor publik khususnya berkaitan dengan penerimaan dan belanja daerah. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian dapat menjadi masukan yang berguna dalam pengelolaan penerimaan daerah secara efektif dan efisien. Dalam penyusunan kebijakan di masa yang akan datang, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang akan meningkatkan serta menurunkan tingkat penerimaan daerah. Jika efektifitas dan efisiensi itu terwujud, pemerintah daerah dapat mengalokasikan penerimaan dalam pos-pos belanja dengan tepat agar tercipta kemandirian di bidang keuangan daerah.

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Penerimaan Daerah

Mankiw (2003)[10] menyebutkan bahwa komponen dalam pendapatan nasional terdiri dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah yang dapat dituliskan melalui persamaa Y= C + I + G, dimana Y (*Pendapatan*), C (*konsumsi),* I (*Investasi*), G (*pembelian Pemerintah*). Sementara itu, pendapatan dalam suatu daerah menurut Khusaini (2006)[11] adalah pendapatan yang mengutamakan pada penerimaan atau penambahan ekuitas dana tambahan dalam periode waktu anggaran tertentu yang menjadi hak pemerintah daerah. Penerimaan tersebut menurut Suparmoko (2011) berasal dari enam sumber, yaitu: Pendapatan Asli Darah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Pinjaman Daerah, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan.

10 Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2003).

11 Mohammad Khusaini, *Ekonomi Publik (Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*), (Malang: Badan Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006).

Tiga sumber dana pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan sumber dana lainnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi, sumber pendanaan bagi pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

2.1.2. Produk Domestik Bruto

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah sama dengan pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut (Badan Pusat Statistik, 2011 dalam Mutiara, 2015).[12]

Wijayanto dan Wisyaningsih (2007)[13] mengungkapkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai barang dan jasa yang di produksi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di suatu daerah (region). Sementara itu, Purnastuti dan Mustikawati (2008)[14] menyatakan bahwa PDRB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan selama kurun waktu satu tahun pada suatu wilayah regional. Produk Domestik Bruto Atas Harga konstan harus ditentukan tahun dasar terlebih dahulu, yaitu tahun ketika perekonomian berada dalam kondisi baik sehingga harga-harga tetap stabil atau konstan (Arifin, 2007).[15]

2.1.3. Inflasi

Persoalan ekonomi yang sering diangkat menjadi komoditas politik adalah inflasi (Rahardja dan Manurung, 2008).[16] Inflasi yang tinggi bisa mendorong masyarakat untuk menarik tabungan

12 Dwika Julia Mutiara. Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur. *Signifikan 4(1),* 2015.

13 Bambang Wijayanto dan Aristanti Wisyaningsih, *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi,* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007).

14 Losina Purnastuti dan Rr. Indah Mustikawati, *Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X*, (Jakarta: Grasindo, 2008).

15 Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi,* (Bandung: Grafindo, 2007).

16 Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro,* (Jakarta: FE-UI, 2008).

Indonesian Treasury Review Vol. 2 No. 1, 2017, Hal. 57-77

sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kekurangan dana yang dimiliki bank (Putong, 2009).[17] Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu (Rahardja dan Manurung, 2008):

a. Kenaikan harga
Harga suatu komoditas dikatakan naik apabila harga tersebut menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga periode sebelumnya.

b. Bersifat umum
Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi apabila kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.

c. Berlangsung terus-menerus
Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi jika terjadinya hanya sesaat. Oleh karena itu, perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi antara lain:

a. Indeks Harga Konsumen (IHK)
IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. IHK merupakan indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)
IHPB merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah pada periode tertentu.

c. GDP Deflator
Prinsip dasar GDP deflator adalah membandingkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil. Penelitian ini menggunakan indikator inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), seperti yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai acuan dalam mengukur tingkat inflasi. Selain itu, IHK juga digunakan di banyak Negara termasuk Indonesia (Puspopranoto, 2004).[18]

---

[17] Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, Edisi 3, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009).

[18] Sawaldjo Puspopranoto, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004).

2.1.4. Kurs

Mata uang memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai satuan hitung, penyimpan nilai, standar pembayaran di masa mendatang serta merupakan alat tukar/ pembayaran (Rahardja dan Manurung, 2008). Nilai tukar dari suatu negara merupakan hal penting bagi negara yang bersangkutan karena memiliki keterkaitan dengan mata uang negara lain dalam perekonomian (Puspopranoto, 2004). Nilai tukar (*exchange rates*) menunjukkan banyaknya unit mata uang yang dapat dibeli atau ditukar dengan satu satuan mata uang lain (Sartono, 1996).[19] Nilai tukar menurut Fadjar *et al.* (2012)[20] adalah rasio pertukaran (harga) yang menggambarkan berapa banyak suatu mata uang harus dipertukarkan untuk memperoleh satu unit mata uang lain. Sedangkan menurut Todaro (2004) dalam Salawati (2008),[21] nilai tukar adalah:

> *"Suatu patokan dimana Bank Sentral Negara yang bersangkutan bersedia melakukan transaksi mata uang setempat dengan mata uang asing di pasar-pasar valuta asing yang telah ditentukan."*

Apresiasi merupakan kondisi menguatnya nilai tukar karena mekanisme pasar. Sebaliknya, depresiasi adalah melemahnya nilai tukar karena kekuatan pasar. Nilai tukar yang berfluktuasi mempunyai dampak yang penting (Weston dan Copeland, 1995).[22] Menurut Sukirno (2007)[23], depresiasi sesuatu mata uang cenderung akan menaikkan ekspor dan mengurangi impor, dan sebaliknya, apresiasi mata uang cenderung mengurangi ekspor dan menambah impor. Nilai tukar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

---

[19] Agus R Sartono, *Manajemen Keuangan*, Edisi 3, (Yogyakarta: BFFE, 1996).

[20] Aris Fadjar, Hedwigis Esti R dan Tri Prihatini EKP, Analisis Faktor Internal dan Eksternal Bank yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum di Indonesia, *Journal of Management and Business Review*, 10 (1), 2013.

[21] Salawati, Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jakarta Selatan, *Skripsi.* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

[22] Fred I Weston dan Thomas E Copeland, *Manajemen Keuangan*, Edisi Kesembilan, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2005).

[23] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

2.1.5. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurang ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali (Halim, 2001;[24] Yuwono *et al.* 2005;[25] Mahsum, 2011).[26] Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, Dengan kata lain, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Joncto Nomor 13 Tahun 2006). Belanja daerah terdiri dari dua komponen utama yaitu:

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)
   Kelompok BTL merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung (BL)
   Kelompok BL merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

2.2. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam penelitian untuk mengetahui determinan penerimaan dan belanja daerah. Penelitian terdahulu yang digunakan diantaranya adalah Panggabean (2009),[27] Aryanti dan Indarti (2010), Hye dan Jalil (2010),[28] Muchtholifah (2010), Leslie *et al.* (2011),[29] Widjajakoesoema (2011),[30] Arlina dan Purwanti (2013), Gitaningtyas, *et al.* (2014), Syamni *et al.* (2014),[31] Ullah (2016).[32]

Penelitian Gitaningtyas *et al.* (2014) menguji pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan investasi swasta terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen (produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan investasi swasta) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (realisasi Pendapatan Asli Daerah). Selanjutnya, Aryanti dan Indarti (2010) meneliti pengaruh variabel makro ekonomi (GDP dan tingkat inflasi) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2000-2009. Hasilnya, GDP berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

Muchtholifah (2010) menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri, dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto. Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan adalah PDRB. Penelitian Arlina dan Purwanti (2013) tentang pengaruh jumlah kunjungan turis asing dan domestik, investasi pariwisata, nilai tukar dolar, dan keamanan terhadap pendapatan daerah sektor parisiwisata di Jakarta tahun 1991-2012 menggunakan regresi linear berganda menunjukkan hasil jumlah kunjungan turis dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata di Jakarta.

Sementara itu, Leslie *et al.* (2011) menggunakan *Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS)* untuk menguji hubungan

---

[24] Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2001).

[25] Sony Yuwono *et al.*, *Penganggaran Sektor Publik,* (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005).

[26] Muhammad Mahsum, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFE, 2011).

[27] Henri Edison H Panggabean. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir, *Tesis.* (Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2009).

[28] Qazi Muhammad Adnan Hye dan M. Anwar Jalil, Revenue and Expenditure Nexus: A Case Study of Romania, *Romanian Journal of Fiscal Policy*, 1(1), 2010.

[29] Larry L Leslie *et al.*, *Reaserch in Higher Education Journal of the Association for Institutional Research,* 50 (7), 2011.

[30] Ang Sandera Widjajakoesoema. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah di Kota Kediri. *Cahaya Aktiva, 1(1),* 2011, hlm. 10-15.

[31] Ghazali Syamni *et al.*, Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Kebangsaan, 3(5),* 2014, hlm. 11-19.

[32] Nazim Ullah, The Relationship of Government Revenue and Government Expenditure: A Case Study of Malaysia, *Munich Personal RePEc Archive,* 2016, hlm. 1-20.

antara pendapatan dan belanja pada 96 universitas tahun akademik 1984-1985 dan 2007-2008. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan hubungan kuat antara pendapatan dan belanja pada beberapa institusi. Penelitian yang dilakukan oleh Widjajakoesoema (2011) meneliti pengaruh empiris pendapatan terhadap belanja Kota Kediri menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendapatan terhadap belanja Kota Kediri tahun 2005-2009. Selanjutnya, Ullah (2016) melakukan pengujian terhadap hubungan antara penerimaan dan belanja di Malaysia. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa walaupun penerimaan terbesar pemerintah berasal dari sektor pajak, variabel penerimaan yang mempengaruhi belanja di Malaysia adalah penerimaan non pajak. Berikutnya, Hye dan Jalil (2010) melakukan pengujian terhadap hubungan kausal antara penerimaan dan belanja pemerintah Romania menggunakan *autoregressive distributive lag approach*. Penelitian tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara penerimaan dan belanja pemerintah dalam jangka panjang.

Di lain sisi, Syamni *et al*. (2014) menganalisis hubungan antara penerimaan (pajak, retribusi serta penerimaan lainnya) dan belanja di Aceh Utara dalam kurun waktu 30 tahun dari 1982 sampai 2011. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerimaan berpengaruh langsung terhadap belanja daerah di Aceh Utara dimana semakin tinggi penerimaan daerah, semakin banyak belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Berdasarkan temuan ini, Pemerintah Daerah Aceh Utara serta pemerintah daerah di Indonesia pada umumnya harus lebih aktif dalam meningkatkan penerimaan daerah. Berikutnya, penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah dilakukan oleh Panggabean (2009) di Kabupaten Toba Samosir selama 8 tahun dari 2000-2007. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (pajak, retribusi dan pendapatan lain) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah secara parsial maupun simultan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menganalisis penerimaan dan belanja daerah 10 provinsi di Indonesia. Penelitian-penelitian lain pada umumnya meneliti untuk satu wilayah yaitu pada satu Provinsi, Kota/ Kabupaten. Meskipun terdapat penelitian yang meneliti pengaruh penerimaan terhadap belanja untuk beberapa institusi yaitu penelitian Leslie *et al.* (2011), namun penelitian tersebut dilakukan pada lingkup universitas. Selain itu, berbeda dengan penelitian lainnya yang melakukan analisis penerimaan dan belanja secara terpisah seperti Ullah (2016), Yeny dan Taufik (2014), Arlina dan Purwanti (2013), Leslie *et al.* (2011), serta Widjajakoesoema (2011), penelitian ini menggabungkan pengujian penerimaan dan belanja daerah dalam satu penelitian.

2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan studi literatur, variabel penelitian dalam model 1 adalah penerimaan daerah sebagai variabel dependen, dan PDRB, Inflasi, serta Kurs sebagai variabel independen. Sedangkan dalam model 2, penerimaan daerah menjadi variabel independen dan belanja daerah merupakan variabel dependen. Model kerangka konseptual penelitian ini tercantum dalam Gambar 4 terlampir.

2.4. Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan salah satu cara dalam statistika guna menguji "parameter" populasi berdasarkan statistik sampelnya untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu (Supangat, 2007).[33] Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran tersebut maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut (Gambar 5):

H1 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah
H2 : Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah
H3 : Kurs berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah
H4 : Penerimaan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu bulan Oktober hingga November 2016 dan tergolong dalam penelitian kuantitatif. Aspek metodologinya terdiri dari jenis-jenis bidang pendekatan empirik dan statistik yang menyajikan angka-angka.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

   Penerimaan daerah menggunakan nilai penerimaan provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan,

[33] Andi Supangat, *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif Inferensi dan Non Parametrik,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Aceh dan Jambi dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

2. Variabel Independen
   a. Produk Domestik Regional Bruto berasal dari nilai PDRB provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Aceh dan Jambi dari tahun 2010 sampai dengan 2014.
   b. Inflasi menggunakan data inflasi tahunan Indonesia 2010 hingga 2014 sebagai basis perhitungan inflasi.
   c. Kurs berasal dari besarnya rata-rata nilai tukar mata uang Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2014.
   d. Belanja Daerah berasal dari nilai belanja provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Aceh dan Jambi dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

3.3. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang karakteristiknya harus dijelaskan secara akurat agar jika sampel dibutuhkan maka jumlah dan cara pengambilannya dapat ditentukan dengan tepat. Sugiyono (2012)[34] menyatakan bahwa populasi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek. Hal ini senada dengan pengertian populasi yang dikemukakan oleh Indriantoro dan Supomo (2002)[35] yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Sementara itu, kelompok populasi (*population frame*) merupakan kumpulan semua elemen dalam populasi dimana sampel diambil (Sekaran, 2006).[36] Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi, artinya tidak semua elemen populasi akan membentuk sampel. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling. Purposive Sampling* merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian). Sampel dalam penelitian ini adalah 10 Provinsi dengan jumlah populasi penduduk terpadat pada tahun 2014 berdasarkan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Provinsi yang dipilih adalah provinsi yang termasuk dalam provinsi di Indonesia dengan populasi penduduk terpadat pada tahun 2010 sampai dengan 2014.
2. Data PDRB, Inflasi, Kurs, Penerimaan daerah dan Belanja Daerah yang digunakan adalah data tahunan.
3. Provinsi yang menjadi sampel penelitian harus memiliki data PDRB, Inflasi, Kurs, Penerimaan daerah dan Belanja daerah yang lengkap selama tahun 2010 hingga 2014.

3.4. Metode Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel atau gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Periode penelitian selama 5 (lima) tahun. Jumlah observasi yang digunakan berjumlah 10 Provinsi di Indonesia sehingga banyaknya data panel berjumlah 50 data.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2002).[37] Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *archival research* (studi literatur) yang memuat kejadian masa lalu (historis). Pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian pendahuluan yaitu melakukan studi pustaka dengan mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga dilakukan pengkajian data yang dibutuhkan, yaitu jenis data, ketersediaan data dan gambaran mengenai pengolahan data. Tahapan berikutnya adalah

---

[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2012).

[35] Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen,* (Yogyakarta: BPFE, 2002).

[36] Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

[37] Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen,* (Yogyakarta: BPFE, 2002).

Indonesian Treasury Review Vol. 2 No. 1, 2017, Hal. 57-77

penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan guna menjawab persoalan penelitian dan memperkaya literatur guna menunjang data kuantitatif yang diperoleh.

3.5.1. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah data panel. Data panel atau *Pooled Data* merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross-section* (Ajija *et al.* 2011).[38] Menurut Gujarati dan Porter (2012)[39] dalam data panel, unit individu yang sama (misalnya suatu keluarga atau perusahaan atau Negara bagian) di survey dari waktu ke waktu. Data panel memiliki dimensi ruang dan waktu. Baltagi (2005)[40] dalam bukunya yang berjudul *Econometric Analysis of Panel Data* menyatakan:

> "Data panel mengacu pada penggabungan observasi dalam *cross-section* dari rumah tangga konsumen, negara, perusahaan dan lain-lain pada beberapa periode waktu."

Terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan data panel sebagai metode analisis seperti yang dikemukakan oleh Hsiao (2003) dan Klevmarken (1989) dalam Baltagi (2005), yaitu diantaranya:

1. Data panel dapat mengontrol heterogenitas individual. Data panel menyarankan setiap individu, perusahaan, negara memiliki batasan heterogenitas.
2. Data panel memberikan lebih banyak informasi mengenai data, variabel, kolinearitas yang lebih sedikit diantara tingkat kebebasan dan keefisienan variabel yang lebih banyak.
3. Data panel dapat mempelajari perubahan dinamika dengan mempelajari observasi *cross-section* yang berulang-ulang.
4. Data panel dapat mengidentifikasi dan mengukur dampak yang tidak dapat dideteksi dengan mudah pada kemurnian data *cross-section* dan *time-series.*
5. Model data panel memperbolehkan kita untuk membangun dan menguji kesulitan perilaku beberapa model dari kemurnian data *cross-section* dan *time-series.*
6. Data panel mikro terkumpul dalam beberapa individu, perusahaan, dan rumah tangga konsumen menjadi pengukuran yang lebih akurat melebihi pengukuran variable terkecil pada level makro.
7. Data panel makro mempunyai *time-series* yang lebih luas dan tidak seperti permasalahan distribusi khusus non standar dari *unit root test* dalam analisis *time-series.*

Dengan demikian berdasarkan keuntungan penggunaan data panel diatas, maka dapat disimpulkan teknik estimasi dengan model data panel tidak membutuhkan pengujian asumsi klasik (Ajija *et al,* 2011; Gujarati dan Porter, 2012).

3.5.2. Model Awal

Langkah awal untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB, Inflasi dan Kurs terhadap Penerimaan Daerah digunakan model ekonometrika dengan pemodelan panel data sebagai berikut:

$$Yit = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

$$Penerimaan_{it} = \alpha + \beta 1\ PDRB_{it} + \beta 2\ Inflasi_{it} + \beta 3\ Kurs_{it} + \varepsilon_{it}$$

Sementara itu, guna meneliti pengaruh variabel Penerimaan Daerah terhadap Belanja Daerah permodelan panel data yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$Yit = \alpha + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$Belanja_{it} = \alpha + \beta 1\ Penerimaan_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y = Variabel Dependen
α = Konstanta
β = Koefisien Regresi Variabel Independen
i = Menunjukan Provinsi Tertentu
t = Menunjukan Tahun/Periode Tertentu
ε = Kesalahan Pengganggu

3.5.3. Permodelan Data Panel

Menurut Nachrowi dan Usman (2006)[41] dalam bukunya yang berjudul "*Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis ekonomi dan Keuangan*" permodelan data panel dapat dituliskan sebagai berikut:

$Y_{it} = \alpha + \beta_X_{it} + \varepsilon_{it}$ i = 1, 2, ..., N; t = 1, 2, ..., T

Dimana:

N = banyaknya observasi
T = banyaknya waktu
N x T = banyaknya data panel

---

[38] Ajija *et al.*, *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

[39] Damodar N Gujarati dan Dawn C. Porter, *Dasar-dasar Ekonometrika*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

[40] Badi H. Baltagi, *Econometric Analysis of Panel Data*, Third Edition, (England: John Wiley & Sons Ltd, 2005).

[41] D. Nachrowi dan Usman Hardius, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan,* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006).

Langkah selanjutnya, peneliti melakukan estimasi parameter model dengan data panel. Terdapat beberapa teknik yang ditawarkan (Nachrowi dan Usman, 2006), yaitu:

1. *Ordinary Least Square (Common Effect)*
   Teknik ini sama seperti membuat regresi dengan data *time series* atau *cross section*. Akan tetapi, untuk data panel, sebelum membuat regresi kita harus menggabungkan data *cross section* dengan data *time series* (pool data). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi model dengan metode OLS.

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} \text{ ; I = 1, 2, ….., N ; t = 1, 2, …., T}$$

2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)
   Adanya variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya *intercept* yang tidak konstan. Dengan kata lain, *intercept* ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran dan pembentukan model ini.

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + Y_2 W_{2t} + Y_3 W_{3t} + ….. + Y_N W_{Nt} + \delta_2 Z_{i2} + \delta_3 Z_{i3} + ….. + \delta_T Z_{iT} + \varepsilon_{it}$$

   Dimana:
   Y_{it} = variabel terikat untuk individu ke-1 dan waktu ke-t
   X_{it} = variabel bebas untuk individu ke-I dan waktu ke-t
   W_{it} dan Z_{it} variabel dummy yang di definisikan sebagai berikut:
   W_{it} = 1 ; untuk individu i; i = 1, 2, ….., N
   = 0 ; lainnya
   Z_{it} = 1 ; untuk periode t; t = 1, 2, ….., N
   = 0 ; lainnya

3. Model Efek Random (*Random Effect*)
   Jika pada model efek tetap, perbedaan antar individu dan/atau waktu dicerminkan melalui *intercept*, maka pada model efek random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat *error*. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*.

$$Yit = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} ;$$
$$\varepsilon_{it} = u_t + v_t + w_{it}$$

   Dimana :
   u_t= komponen *error cross-section*
   v_t = komponen *error time-series*
   w_{it} = komponen *error* gabungan
   Asumsi yang digunakan untuk komponen *error*adalah :
   $u_t \sim N(0, \delta_u^2)$;
   $v_t \sim N(0, \delta_v^2)$;
   $w_{it} \sim N(0, \delta_w^2)$

3.5.4. Pemilihan Estimasi Regresi Data Panel

Langkah terakhir yaitu memilih estimasi regresi data panel yang tepat. Jalan tengah yang dikemukakan para ahli ekonometri (Nachrowi dan Usman, 2006) yang telah membuktikan secara matematis, mengungkapkan bahwa:

1. Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih besar dibanding jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan metode efek tetap (MET).
   T > N → gunakan MET
2. Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih kecil dibanding jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan metode efek random (MER).
   T < N → gunakan MER

Oleh karena itu berdasarkan teori diatas, penelitian ini menggunakan metode kedua yaitu Model Efek Random (*Random effect*). Hal ini dikarenakan jumlah waktu (T) dalam penelitian adalah 5, lebih kecil dibandingkan jumlah individu (N) sebesar 10.

Namun, untuk lebih memastikan jenis pendekatan data panel, maka diperlukan beberapa uji yang dapat memberikan beberapa rekomendasi terbaik (Gujarati, 2012), antara lain:

1. Uji Chow (*Chow Test*)
   Uji Chow menunjukkan metode estimasi terbaik yang dapat digunakan diantara *Pooled Least Square* dan *Fixed Effect*. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
   H0 = Model Pooled Least Square (Restricted)
   H1 = Model Fixed Effect (Unrestricted)
   Jika nilai probabilitas *chi-square*< 0,05 maka metode yang digunakan ialah *Fixed Effect,* artinya H0 ditolak. Sedangkan jika probabilitas *chi-square*> 0,05 maka metode yang digunakan ialah *Pooled Least Square,* yang berarti H0 diterima.
2. Uji Hausman (*Hausman Test*)
   Uji Hausman digunakan untuk menunjukkan metode *estimasi* yang dapat digunakan diantara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
   H0 = *Random Effect*
   H1 = *Fixed Effect*
   Jika nilai probabilitas *chi-square*< 0,05 maka metode yang digunakan ialah *Fixed Effect* atau H0 ditolak. Sedangkan jika probabilitas *chi-square*> 0,05 maka metode yang digunakan ialah *Random Effect,* H0 diterima.

3.5.5. Uji Hipotesis

Setelah didapatkan hasil regresi data panel, maka dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini berguna untuk memeriksa atau menguji apakah

koefisien regresi yang didapat adalah signifikan (berbeda nyata). Hal ini berarti suatu nilai koefisien regresi yang secara statistik tidak sama dengan nol. Jika koefisien *slope* sama dengan nol, maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Terdapat tiga macam uji hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

   Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi F. Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif tidak dapat ditolak atau dengan α = 5% variabel independen secara statistik mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Hipotesis dalam pengujian ini dirumuskan sebagai berikut:

   a. $H_0 = \beta_1 = 0$, artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

   b. $H_1 = \beta_1 \neq 0$, artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
   Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel, yaitu:
   $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti H_0 = ditolak
   $F_{hitung} < F_{tabel}$ berarti H_0 = Diterima

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

   Uji statistik t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis dalam pengujian ini adalah:

   a. $H_0 = \beta_1 = 0$, artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

   b. $H_1 = \beta_1 \neq 0$, artinya bahwa semua variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

   Untuk menentukan hipotesis dapat diterima atau tidak, dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai *t* hasil perhitungan dengan nilai *t* tabel. Untuk menentukan *t* tabel, ditentukan tingkat signifikansi sebesar 5%. Sedangkan untuk menentukan *t* hitung digunakan aplikasi *eviews*.
   t hitung >*t* tabel berarti H_0 = Ditolak
   t hitung <*t* tabel berarti H_0 = Diterima

   Apabila tingkat signifikan yang diperoleh (*p-value*) lebih kecil dari 0,05 maka H_0 dapat ditolak atau dengan α = 5% variabel independen tersebut berhubungan secara statistis terhadap variabel dependennya.

3. Uji Koefisien Determinasi (R-squared)

   Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Batasan dari nilai koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (terikat).

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Estimasi *Eviews*

4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif

Subjek dalam penelitian ini adalah 10 provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah populasi tertinggi pada tahun 2010-2014, dan memiliki data statistik yang lengkap dari tahun 2010-2014.

Pada table 4 dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata variabel PENERIMAAN sebesar 6.880028 dengan PENERIMAAN tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 yaitu sebesar 7.811010. Sementara itu, PENERIMAAN terendah pada tahun 2011 dimiliki oleh Provinsi Jambi sebesar 6.145856. Nilai rata-rata PDRB sebesar 5.541529 dengan PDRB tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 yaitu sebesar 6.130897. Sementara itu, PDRB terendah pada tahun 2010 juga dimiliki oleh Provinsi Jambi sebesar 4.957216. Untuk nilai rata-rata INF, yaitu sebesar 0.063580 dengan INF tertinggi berada di angka 0.083800 pada tahun 2013 dan 2014. Sementara itu, INF terendah pada tahun 2011 sebesar 0.037900. Untuk nilai rata-rata KURS sebesar 4.015194 dengan KURS tertinggi pada tahun 2014 sebesar 4.092661 dan KURS terendah sebesar 3.967525 pada tahun 2011. Selanjutnya, nilai rata-rata variabel BELANJA sebesar 6.938946 dengan BELANJA tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 yaitu sebesar 7.812129 sedangkan BELANJA terendah pada tahun 2010 dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6.395529.

4.2. Pengujian Data Panel

4.2.1 Pemilihan *Intercept*

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, guna mengetahui apakah dalam

penelitian ini menggunakan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Method* (FEM), atau *Random Efect Method* (REM), maka dilakukan pengujian dalam menentukan pemilihan *intercept.* Uji Chow (*Chow Test*) digunakan dalam menentukan pemilihan *intercept*, yaitu pemilihan antara *pooled least square* dan *fixed effect*. Dalam pengujian ini, diasumsikan H0 adalah *pooled least square* sedangkan H1 adalah *fixed effect*. Jika *p*-value < α, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, apabila *fixed effect* (H1) diterima maka dilakukan pengujian Hausman (*Hausman Test*). Pengujian ini dilakukan untuk menentukan pilihan antara *fixed effect* dan *random effect*. Dalam pengujian ini, diasumsikan H0 adalah *random effect* dan H1 adalah *fixed effect*. Jika *p*-value < α, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Hasil *Chow Test* atau *Likelihood Ratio Test* menunjukkan nilai *Chi-square* lebih kecil dari 5% sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti menggunakan *fixed effect*. Karena *fixed effect* diterima maka dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu *hausman test* untuk memilih antara *fixed effect* dan *random effect*. Hasil dari *hausman test* menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari 5% sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya, penelitian ini menggunakan *random effect*. Oleh karena itu, metode atau *intercept* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect*.

Selain menggunakan *hausman test* untuk menentukan apakah dalam penelitian ini menggunakan *fixed effect method* (FEM) atau *random effect method* (REM), maka dapat juga menggunakan cara dengan menentukan jumlah waktu (T) dan jumlah individu (N) pada data penelitian. Jika jumlah waktu (T) > jumlah individu (N) maka menggunakan *fixed effect method* (FEM). Sebaliknya, jika jumlah waktu (T) < jumlah individu (N) maka menggunakan *random effect method* (REM) (Nachrowi dan Usman, 2006: 318).

Pada penelitian ini, jumlah waktu (T) sebanyak 5 tahun yaitu dari tahun 2010-2014. Sedangkan jumlah individu (N) sebanyak 10 Provinsi. Maka, penelitian ini menggunakan *random effect method* (REM) karena jumlah waktu (T) lebih kecil dibandingkan jumlah individu (N).

4.2.2 Hasil Estimasi Metode *Random Effect* (*Random Effect Method*)

Penerimaan daerah yang berfluktuasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya PDRB, Inflasi, Kurs, dan belanja daerah. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan metode *random effect* dan dengan tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil estimasi dengan data panel melalui metode *random effect* diperoleh hasil dalam Tabel 5. Persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Penerimaanit = (-7.235885 + *random effect cross*) + 0.197402PDRBit - 2.262342INFit + 3.279005KURSit

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan model regresi panel *random effect* sebagai berikut:

1. Jika PDRB meningkat sebesar 1%, maka secara rata-rata, Penerimaan akan naik sebesar 0.197402% *ceteris paribus*
2. Jika INF meningkat sebesar 1%, maka secara rata-rata, Penerimaan akan turun sebesar 2.262342% *ceteris paribus*
3. Jika KURS meningkat sebesar 1%, maka secara rata-rata, Penerimaan akan turun sebesar 3.279005% *ceteris paribus.*

Dari Tabel 6, dapat dibentuk sebuah persamaan sebagai berikut:

Belanjait = (0.081299+ *random effect cross*) + 0.988774Penerimaanit

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan ke dalam model regresi panel *random effect* yaitu jika Penerimaan meningkat sebesar 1%, maka secara rata-rata, Belanja akan naik sebesar 0.988774% *ceteris paribus*. Dengan menggunakan metode regresi data panel, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh dari setiap perubahan variabel independen Sehingga masing-masing provinsi sampel penelitian mendapatkan pengaruh secara individu dari perubahan tersebut.

4.3. Uji Hipotesis

4.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji-F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (PDRB, Inflasi, Kurs, dan Belanja Daerah) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Penerimaan Daerah). Hipotesis dalam pengujian ini ialah:

1. $H_0 = \beta_1 = 0$, artinya bahwa semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. $H_1 = \beta_1 \neq 0$, artinya bahwa semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dari uji signifikansi simultan (Uji-F) yang telah dilakukan pada dua persamaan diperoleh nilai probabilitas F-satistik sebesar 0.000000 dimana nilai ini lebih kecil dibandingkan standar deviasi (tingkat kesalahan) sebesar 5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa **H1 diterima.** Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen (PDRB, Inflasi dan Kurs) secara bersama-sama

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Penerimaan Daerah). Sementara itu, nilai probabilitas F-satistik persamaan kedua sebesar 0.000000 dimana nilai ini lebih kecil dibandingkan standar deviasi (tingkat kesalahan) sebesar 5% **(H1 diterima)** yang artinya variabel independen (Penerimaan Daerah) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Belanja Daerah).

4.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (PDRB, Inflasi dan Kurs) secara individu atau parsial terhadap variabel dependen (Penerimaan Daerah) pada persamaan pertama. Hasil uji parameter individual (Uji-t) dapat dilihat pada Tabel 7. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

a. $H_0 = \beta_1 = 0$, artinya bahwa semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
b. $H_1 = \beta_1 \neq 0$, artinya bahwa semua variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa terdapat 2 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Daerah, variabel tersebut diantaranya INF dan KURS. Hasil ini didapatkan karena nilai penerimaan lebih kecil dari tingkat toleransi kesalahan yang ditetapkan yaitu sebesar 0.05 (5%), hasil ini menunjukkan bahwa **H1 diterima**. Sedangkan variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan sehingga **H1 ditolak.**

Variabel PENERIMAAN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap BELANJA. Hasil ini didapatkan karena nilai penerimaan lebih kecil dari tingkat toleransi kesalahan yang ditetapkan yaitu sebesar 0.05 (5%), **(H1 diterima)**. Hal ini menunjukkan bahwa jika PENERIMAAN meningkat, maka BELANJA pada provinsi juga akan meningkat.

4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R-*squared*)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pada Tabel 7 dapat diamati koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.669593 yang artinya 66.95% variasi Penerimaan Daerah dapat dijelaskan oleh variasi yang ditinjau dari faktor PDRB, INF dan Kurs. Sementara itu, sisanya yaitu sebesar 33.05% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian. Sedangkan koefisien determinasi (R^2) 0.992062 atau 99.20% (Tabel 8) variabel belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel penerimaan daerah. Sisanya sebesar 0.80% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

4.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dilakukan untuk menganalisis kesesuaian hipotesis penelitian yang telah dirumuskan terhadap hasil pengujian. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 9.

Tabel 9 memperlihatkan hasil bahwa terdapat 2 variabel penelitian yang memiliki hasil pengujian yang sesuai dengan hipotesis, yaitu variabel INF dan KURS. Artinya, kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Sedangkan variabel PDRB tidak memiliki kesesuaian dengan hipotesis karena variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan daerah.

Tabel 10 menggambarkan hubungan yang signifikan antara variabel PENERIMAAN dengan variabel dependen yaitu belanja daerah. Artinya, variabel tersebut berpengaruh terhadap belanja daerah.

4.4. Pembahasan dan Implikasi Hasil Pengujian

Setelah mendapatkan hasil pengujian, maka dapat dilakukan pembahasan mengenai pengaruh variabel PDRB, Inflasi dan Kurs terhadap Penerimaan Daerah serta pengaruh variabel Penerimaan Daerah terhadap Belanja Daerah dengan disertai uraian penelitian terdahulu untuk memberikan justifikasi dan argumentasi yang kuat mengenai hasil pengujian.

4.4.1. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penerimaan Daerah

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Derah. Secara teori, PDRB yang besar mengindikasikan besarnya penghasilan individu maupun badan usaha, sehingga pajak yang seharusnya dibayarkan kepada daerah juga lebih besar. Namun, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan pengusaha Indonesia mudah sekali menghindari pajak (Hartati, 2014)[42] sehingga besarnya jumlah PDRB tidak terdeteksi dalam penerimaan daerah. Fenomena ini diakui oleh

[42] Hartati, *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah, *Tesis (tidak dipublikasikan),* (Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2014).

Indonesian Treasury Review Vol. 2 No. 1, 2017, Hal. 57-77

Ketua Komisi Pengawas Perpajakan, Daeng Nazier:[43]

> *"Indonesia kepatuhan pajaknya secara formal hanya 56%. Itu formalnya saja, artinya masyarakat yang mau isi SPT. Sementara secara materil bisa tinggi, artinya dihitung dia bayar pajak sudah sesuai apa tidak dengan SPT-nya".*

Dua faktor yang mempengaruhi kesadaran individu dalam membayar pajak adalah pemahaman sistem *self assessment* (Nasution, 2015) dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak (Pajak, 2016). Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan tujuh alasan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai berikut:[44]

> *"Tax compliance selama ini rendah karena, satu, masyarakat tidak taat pada UU perpajakan. Kedua, kurang percaya pada aparat pajak. Ketiga, ada masyarakat yang masih mencoba-coba bayar pajak. Selanjutnya, pajak masih belum menjadi budaya karena masyarakat Indonesia lebih takut tidak memiliki SIM dibandingkan tidak memiliki NPWP. Lalu kelima, uang pajak dipakai untuk apa? Banyak masyarakat belum paham. Keenam, adalah karena adanya sistem bebas pajak dari beberapa negara. Terakhir, karena masih sulitnya untuk melakukan pelaporan perpajakan".*

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menjalankan program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) kepada wajib pajak yang belum melaporkan asset selama ini (Pajak, 2016).[45] *Tax Amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Ragimun, tanpa tahun). Diharapkan, program ini dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

[43] Suaramerdeka.com, "Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah", diakses pada tanggal 25 November 2016.

[44] Okezone.com, "7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak", diakses pada tanggal 25 November 2016.

[45] Direktorat Jenderal Pajak, "Tax Amnesty", diakses dari www.pajak.go.id, pada tanggal 25 November 2016.

4.4.2. Analisis Inflasi (INF) Terhadap Penerimaan Daerah

Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah. Hasil ini sesuai dengan rumusan hipotesis yang menyatakan bahwa Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Daerah sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil ini sejalan dengan Muchtholifah (2010) bahwa jika tingkat Inflasi rendah maka Penerimaan Daerah mengalami kenaikan. Logikanya adalah ketika tingkat inflasi tinggi, harga barang meningkat sehingga daya beli masyarakat atau konsumsi masyarakat cenderung menurun. Penurunan daya beli masyarakat ini pada akhirnya akan berdampak pada penurunan jumlah penerimaan daerah, khususnya pada Penerimaan Daerah yang penetapannya didasarkan pada omset penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran (Husna, 2015).

4.4.3. Analisis Pengaruh Kurs Terhadap Penerimaan Daerah

Pengujian yang telah dilakukan memperoleh hasil terdapat pengaruh antara variabel Kurs terhadap Penerimaan Daerah. Hal ini senada dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utari (2002) serta Arlina dan Purwanti (2013). Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara kurs dan penerimaan daerah sector pariwisata. Artinya, Jika kurs dollar terhadap rupiah menguat di sisi lain nilai rupiah melemah. Dampaknya adalah pada kunjungan dan daya beli wisatawan mancanegara yang akan meningkat. Peningkatan ini menyebabkan nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh para wisatawan akan semakin besar sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari industri pariwisata. Hasil ini didukung fakta 10 provinsi yang menjadi sampel penelitian (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Aceh dan Jambi) mayoritas memiliki area pariwisata yang cukup popular diantaranya Pantai Pangandaran di Jawa Barat, Gunung Bromo di Jawa Timur maupun Pantai Losari di Sulawesi Selatan. Hal ini senada dengan pernyataan Arlina dan Purwanti (2013) dalam penelitiannya yaitu ketika rupiah melemah, harga pariwisata Indonesia menjadi menurun dan jumlah kunjungan wisman serta pengeluarannya akan meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan daerah dari industri pariwisata.

4.4.4. Analisis Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerimaan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin tinggi Penerimaan Daerah maka akan semakin tinggi pula

Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Panggabean (2009), Hye dan Jalil (2010), Leslie *et al.* (2011), Widjajakoesoema (2011), Syamni *et al.* (2014) serta Ullah (2016).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Daerah harus berusaha untuk meningkatkan penerimaan daerah yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Untuk meningkatkan penerimaan daerah, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, diantaranya PDRB, Inflasi, dan nilai tukar (kurs). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap penerimaan daerah karena kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah sehingga kenaikan PDRB tidak terdeteksi pada penerimaan daerah. Sementara itu, Inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penerimaan Daerah. Apabila Inflasi meningkat, Penerimaan Daerah akan mengalami penurunan dan sebaliknya.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan dari Kurs terhadap Penerimaan Daerah. Apabila kurs dolar terhadap rupiah menguat, maka kunjungan dan daya beli wisatawan mancanegara akan meningkat. Peningkatan ini menyebabkan nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh para wisatawan akan semakin besar sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari industri pariwisata. Di sisi lain, Penerimaan Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi penerimaan suatu daerah maka akan semakin tinggi pula belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dalam membayar pajak karena pajak merupakan salah satu sumber untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pencapaian penerimaan daerah yang baik mendorong perekonomian semakin baik pula. Selain itu, pemerintah daerah harus menjaga kestabilan inflasi dan nilai tukar rupiah agar kedepannya dapat meningkatkan pernerimaan daerah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan bagi pembaca serta peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan belanja daerah.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Daerah. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak daerah belum optimal karena tingkat pendapatan yang meningkat tidak berdampak pada Penerimaan Daerah. Fakta ini menggambarkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih menggiatkan sosialisasi mengenai sistem perpajakan di Indonesia termasuk manfaat dan resiko jika lalai dalam membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga harus membenahi kinerja internal agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

Tingginya nilai tukar Rupiah dapat meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini berarti terdapat sisi positif dari kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yaitu pada penerimaan daerah khususnya di sektor pariwisata. Peran pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur di kawasan pariwisata serta melakukan promosi demi mengenalkan potensi pariwisata daerah sangat diharapkan agar menarik kunjungan wisatawan asing. Inflasi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Meningkatnya tingkat inflasi dapat menurukan penerimaan daerah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus menjaga kestabilan ekonomi di daerahnya.

Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun 2010-2014 dan pada 10 provinsi di Indonesia. Keterbatasan waktu penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan generalisasi terhadap determinan penerimaan dan belanja daerah. Penelitian berikutnya diharapkan dapat dilakukan dengan memperbesar waktu dan memperluas objek penelitian. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memasukkan analisis terhadap penerimaan daerah dengan mengklasifikasikan sesuai sumber penerimaannya (PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah) agar memperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCES*)

Ajija, Shochrul R, Dyah W Sari, Rahmat H Setianto, Martha R Primanti. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.

Ariasih, Ni Nyoman Pande, I Mande Suyana Utama, I G A P Wirathi. (tanpa tahun). Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. *Jurnal Universitas Udayana, 543-562.*

Arifin, Imamul. (2007). *Membukan Cakrawala Ekonomi.* Bandung: Grafindo.

Arlina, Riska & Evi Yulia Purwanti. (2013). Analisis Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Diponegoro Journal of Economics, 2 (3), 1-15.*

Aryanti, Eni & Iin Indarti. (2010). Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang.

Badan Pusat Statistik, diakses dari www.bps.go.id pada tanggal 17 November 2016.

Baltagi, Badi. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. Third Edition. England: John Wiley & Sons Ltd.

Bank Indonesia "Statistik Ekonomi dan Keuangan", diakses dari www.bi.go.id pada tanggal 17 November 2016.

Direktorat Jenderal Pajak, "Tax Amnesty", diakses dari www.pajak.go.id, pada tanggal 25 November 2016.

Direktorat Jenderal Pajak, "Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak", diakses dari www.pajak.go.id, pada tanggal 25 November 2016.

Fadjar, Aris, Hedwigis Esti R & Tri Prihatini EKP. (2013). Analisis Faktor Internal dan Eksternal Bank yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum di Indonesia. *Journal of Management and Business Review*, 10 (1).

Gitaningtyas, Yeny Kurniawati & Taufik Kurrohman. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Artikel Ilmiah Mahasiswa, 1-7.*

Gujarati, Damodar N. & Dawn C. Porter. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2001). *Manejemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.

Hartati. (2014). *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah. *Tesis.* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Husna, Umdatul. (2015). Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota Se Jawa Tengah. *Skripsi.* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Hye, Qazi Muhammad Adnan & M. Anwar Jalil (2010). Revenue and Expenditure Nexus: A Case Study of Romania. *Romanian Journal of Fiscal Policy*, 1(1).

Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta: BPFE.

Khusaini, Mohammad. (2006). *Ekonomi Publik (desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*). Malang: Badan Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Leslie, Larry L., Sheila Slaughter, Barret J. Taylor & Liang Zhang. (2011). *Reaserch In Higher Education Journal of the Association for Institutional Research,* 50 (7).

Mahsum, Muhammad. (2011). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.

Mankiw, Gregory. (2003). *Pengantar Ekonomi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Muchtholifah. (2010). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi industry dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan, 1(1)*.

Mutiara, Dwika Julia. (2015). Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur. *Signifikan 4(1).*

Nachrowi, D. Nachrowi & Usman Hardius. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Nasution, Rajabuddin. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan pada sector usaha kecil dan menengah di kota medan timur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara.

Nurcholis, Hanif. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Okezone, "7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak" diakses dari www.okezone.com, pada tanggal 25 November 2016.

Panggabean, Henri Edison H. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja

Daerah di Kabupaten Toba Samosir. *Tesis.* Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pratiwi, Novi. (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia, *Tesis* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Purnastuti, Losina & Rr. Indah Mustikawati. (2008). Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Grasindo.

Puspopranoto, Sawaldjo. (2004). *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Putong, Iskandar. (2009). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Ragimun (tanpa tahun). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak *(Tax Amnesty)* di Indonesia. *Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, 1-27.*

Rahardja, Pratama &Mandala Manurung. (2008). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: FE-UI.

Salawati. (2008). Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jakarta Selatan. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sartono, R. Agus. (1996). *Manajemen Keuangan*, Edisi 3. Yogyakarta: BFFE.

Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Suaramerdeka, "Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah", diakses dari www.suaramerdeka.com, pada tanggal 25 November 2016.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sukirno, Sadono. (2007). *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supangat, Andi. (2007). *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif Inferensi dan Non Parametrik.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suparmoko. (2011). *Keuangan Negara, Edisi Keenam*. Yogyakarta: BPFE.

Syamni, Ghazali, Zaafri Husodo & Syarifuddin. (2014). Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Kebangsaan, 3(5), 11-19.*

Todaro, Micheal P & Stephen C Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Delapan*. Penerbit Erlangga: Jakarta.

Ullah, Nazim. (2016). The Relationship of Government Revenue and Government Expenditure: A Case Study of Malaysia. *Munich Personal RePEc Archive,* 1-20.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Utari, Woro. (2002). Analisis Fundamental Makro Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Warsito, Kawedar, Abdul Rohman, & Sri Handayani. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah.* Semarang: Penerbit UNDIP.

Weston, J Fred & Thomas E Copeland. (2005). *Manajemen Keuangan*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Binarupa Aksara.

Widjajakoesoema, Ang Sandera. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah di Kota Kediri. *Cahaya Aktiva, 1(1), 10-15.*

Wijayanto, Bambang & Aristanti Wisyaningsih. (2007). *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi.* Bandung: Grafindo Media Pratama.

Yuwono, Sony, Agus Indrajaya & Hariyandi. (2005). *Penganggaran Sektor Publik.* Bayumedia Publishing: Surabaya.

TABEL

Tabel 1. Variabel Dependen dan Independen

Nama Variabel	Definisi
Dependen	
Penerimaan Daerah	Pendapatan yang mengutamakan pada penerimaan atau penambahan ekuitas dana tambahan dalam periode waktu anggaran tertentu yang menjadi hak pemerintah daerah.
Belanja Daerah	Semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah
Independen	
PDRB	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu.
Inflasi	Kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.
Kurs	Rasio pertukaran (harga) yang menggambarkan berapa banyak suatu mata uang harus dipertukarkan untuk memperoleh satu unit mata uang lain.
Penerimaan Daerah	Pendapatan yang mengutamakan pada penerimaan atau penambahan ekuitas dana tambahan dalam periode waktu anggaran tertentu yang menjadi hak pemerintah daerah.

Sumber: Diolah Peneliti, 2016

Tabel 2. Jumlah Sampel Berdasarkan Karakteristik Sampel

No	Karakteristik Sampel	Jumlah
1	Jumlah Provinsi di Indonesia tahun 2010-2014	34
2	10 Provinsi dengan Populasi Penduduk Terbanyak	10
3	Provinsi dengan data PDRB, Inflasi, Kurs, Penerimaan daerah dan Belanja Daerah lengkap	10
	Jumlah Sampel	**10**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah peneliti)

Tabel 3. Sumber Data Penelitian

Variabel	Sumber Data
Dependen	
Penerimaan Daerah	Badan Pusat Statistik
Independen	
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Badan Pusat Statistik
Inflasi	Badan Pusat Statistik
Kurs	Bank Indonesia
Belanja Daerah	Badan Pusat Statistik

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, 2010 sampai 2014 (diolah peneliti)

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	PENERIMAAN (Triliun Rupiah)	PDRB (Triliun Rupiah)	INF (Persen)	KURS (Rupiah)	BELANJA (Triliun Rupiah)
Mean	6.880028	5.541529	0.063580	4.015194	6.938946
Median	6.852067	5.477558	0.069600	3.994774	6.874492
Maximum	7.811010	6.138097	0.083800	4.092661	7.812129
Minimum	6.145856	4.957216	0.037900	3.967524	6.395529
Std. Dev.	0.359617	0.410643	0.019841	0.046097	0.339463
Observations	50	50	50	50	50

Sumber: Diolah Peneliti, 2016

Indonesian Treasury Review Vol. 2 No. 1, 2017, Hal. 57-77

Tabel 5. *Random Effect*

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	-7.235885	1.610036	-4.494237	0.0000
PDRB?	0.197402	0.107741	1.832185	0.0734
INF?	-2.262342	0.923007	-2.451057	0.0181
KURS?	3.279005	0.399111	8.215766	0.0000
R-squared	0.669593			
F-statistic	31.07409			
Prob (F-stat)	0.000000			

Sumber: *Random Effect Method*

Tabel 6. *Random Effect*

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	0.081299	0.088643	0.917148	0.3637
Penerimaan?	0.988774	0.012867	76.84644	0.0000
R-squared	0.992062			
F-statistic	5998.503			
Prob (F-stat)	0.000000			

Sumber: *Random Effect Method*

Tabel 7. Uji Parameter Individual (Uji-t)

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob	Signifikansi
C	-7.235885	-4.494237	0.0000	
PDRB?	0.197402	0.0000	0.0734	Tidak Signifikan
INF?	-2.262342	1.832185	0.0181	Negatif, Signifikan
KURS?	3.279005	0.0734	0.0000	Positif, Signifikan

Sumber: *Random Effect Method Eviews 6*, 2016 (data diolah)

Tabel 8. Uji Parameter Individual (Uji-t)

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob	Signifikansi
C	0.081299	0.917148	0.3637	
PENERIMAAN?	0.988774	76.84644	0.0000	Positif, signifikan

Sumber: *Random Effect Method Eviews 6*, 2016 (data diolah)

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Hipotesis	Hasil Pengujian
PDRB	Signifikan	Tidak signifikan
INF	Signifikan	Signifikan
KURS	Signifikan	Signifikan

Sumber: *Random Effect Method Eviews 6*, 2016 (data diolah)

Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Hipotesis	Hasil Pengujian
PENERIMAAN	Signifikan	Signifikan

Sumber: *Random Effect Method Eviews 6*, 2016 (data diolah)

GRAFIK

Gambar 1. Grafik Penerimaan Daerah (dalam Jutaan Rupiah)
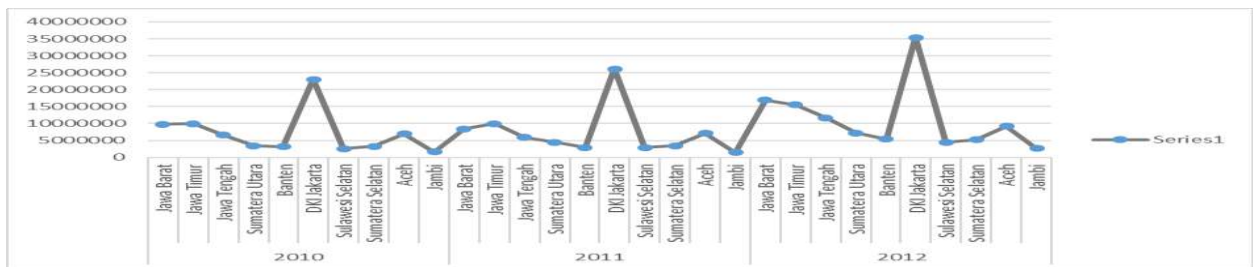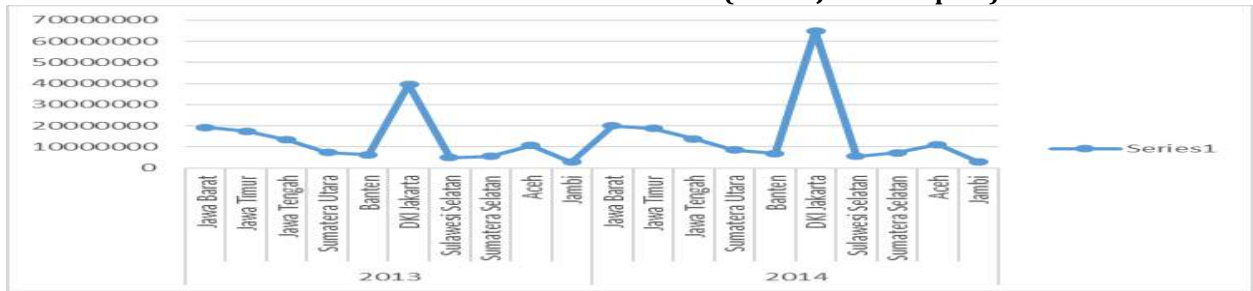
Sumber: diolah peneliti, 2016

Gambar 2. Grafik Belanja Daerah (dalam Jutaan Rupiah)
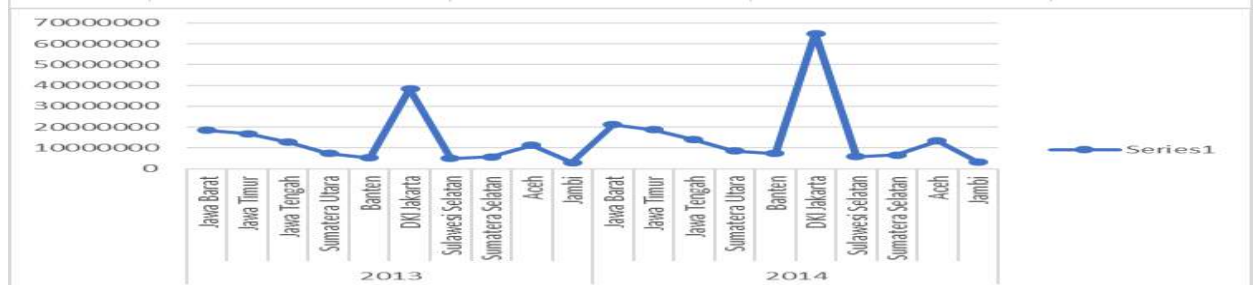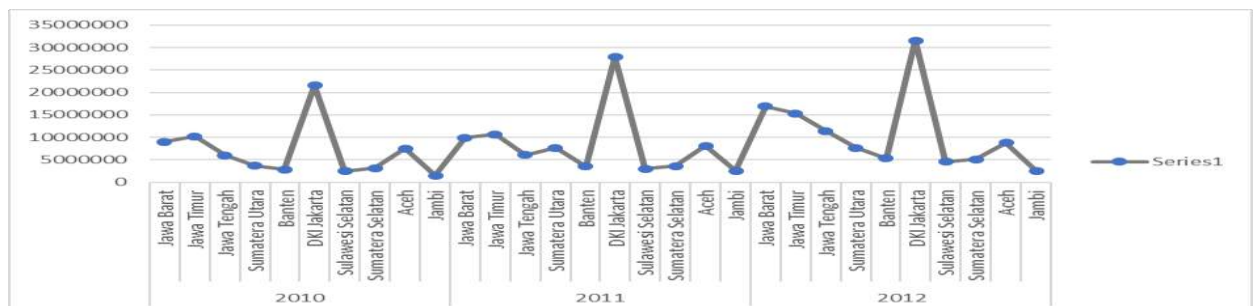
Sumber: diolah peneliti, 2016

Gambar 3. Perbandingan Penerimaan dan Belanja Daerah (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber: diolah peneliti, 2016

Indonesian Treasury Review Vol. 2 No. 1, 2017, Hal. 57-77
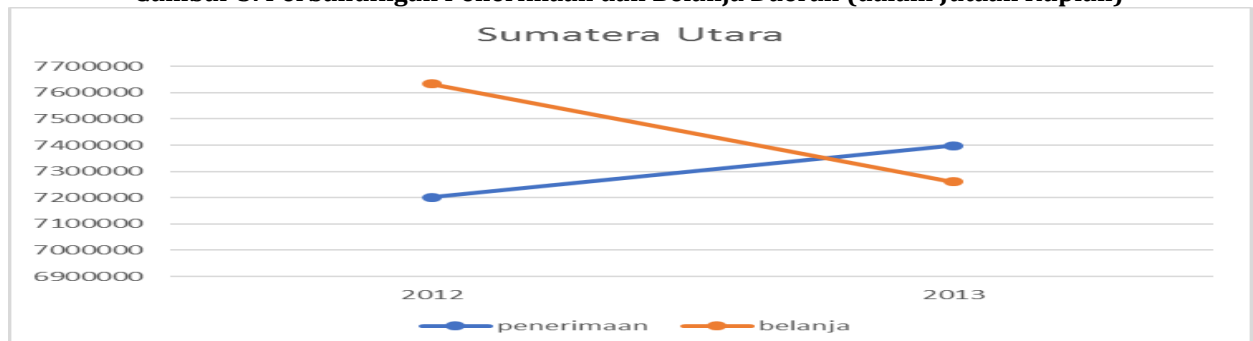
Gambar 4. Kerangka Konseptual Determinan Penerimaan dan Belanja Daerah
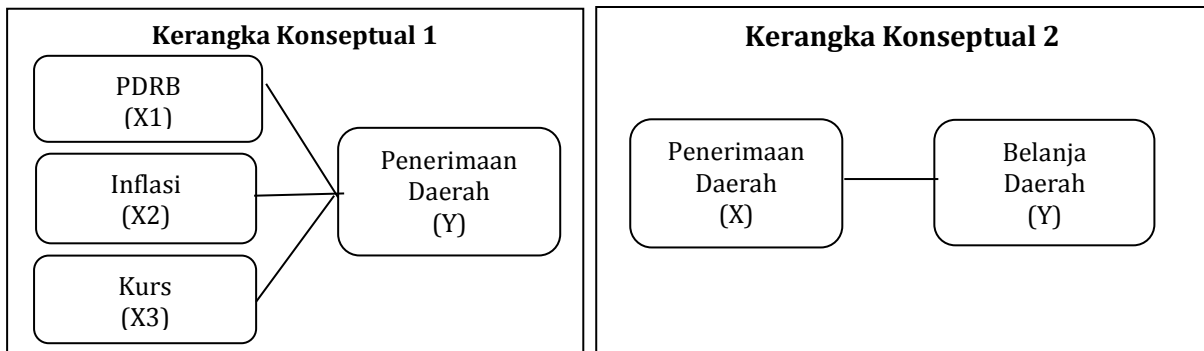
Sumber: Diolah Peneliti, 2016

Gambar 5. Hipotesis Penelitian

: Pengaruh secara parsial
: Pengaruh secara simultan
Sumber: Diolah Peneliti, 2016